

## KINERJA PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIGI DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI

Ferra

*johantandibato@yahoo.co.id*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)*

### Abstract

*This research aims at finding out whether the performance of the Parliament Secretariat employees at Sigi Regency in carrying out their duties and functions has been categorized well. This is a qualitative research in term of case study. The setting and the informants were chosen purposively. The data were analyzed gradually based on the information which were obtained from observations, interviews, and documentations. This research employs five indicators of Agus Dwiyanto's theory to measure the employees' performance in public service, namely productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Of those five performance indicators, productivity, service quality, and accountability are not running as expected and still categorized as unsatisfying. While responsiveness and responsibility indicators are tolerably good because the responsiveness indicator has given a description of the ability in recognizing the public desire and the priority programs organizing which would be accomplished. The responsibility is also categorized as good because the programs have run based on administration principles and based on the real principles. Therefore, the parliament secretariat employees can perform their duties and functions effectively and efficiently in improving public service.*

**Keywords:** *Employees' Performance, Parliament Secretariat.*

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka lembaga perwakilan merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan normative bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak Negara, lembaga legislative memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan lembaga perwakilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya lembaga legislative saja sebagai wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak (aspirasi) rakyat dalam bentuk undang-undang, sementara pihak eksekutif hanya melaksanakan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan salah satu lembaga yang sangat besar peranannya dalam pembangunan. Sebagai bukti peranan lembaga dimaksudkan, secara jelas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu: (1) fungsi legislasi, yaitu fungsi DPRD untuk membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah; (2) Fungsi Anggaran, yaitu fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD; (2) Fungsi Pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah serta kebijakan nasional lainnya.

Untuk penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpinan DPRD dan Anggotanya dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam konteks inilah, maka dukungan yang disediakan oleh dan melalui Sekretariat DPRD sangat besar dan karenanya mencerminkan peran yang kunci berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD sebagai organisasi pendukung kinerja DPRD dan anggotanya dalam kedudukannya sebagai unsur pelayanan terhadap DPRD, berdasarkan tugas dan fungsi yang diembannya membutuhkan perhatian sangat besar pada pentingnya peningkatan kapasitas Staf Teknis dan kemampuan pelayanan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat yang optimal. Mengingat sangat kompleksnya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sigi, maka hubungan kerja Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD harus terpelihara dengan baik, agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan Sekretariat DPRD dapat berjalan lancar, karena Sekretariat DPRD merupakan sarana agar DPRD dapat menunjukkan kinerja yang baik.

Pelayanan memang cukup menentukan kinerja pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, terutama terkait dengan tingkat produktivitas dan akuntabilitas. Hal inilah yang menjadi permasalahan dasar pada kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah dalam membantu DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam ruang lingkup hubungan kerja sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat berat, Namun tidak didukung kemampuan

kualitas pegawai yang memadai. Fasilitas pendukung seperti komputer (laptop) belum tersedia berdasarkan tingkat kebutuhan, padahal beban kerja begitu besar. Tuntutan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya begitu luas, tapi tidak didukung kualitas pegawai dan jumlah pegawai memadai sesuai dengan tuntutan pekerjaan DPRD Kabupaten Sigi, seperti halnya tuntutan pada reses, pada saat rapat komisi, rapat paripurna, dan rapat panitia khusus dan rapat badan musyawarah. Berdasarkan hal di atas maka Penulis tertarik untuk membahas tentang Kinerja Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya”.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Pengumpulan data dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Oktober s/d Desember 2014. Informan pada penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*) yakni ditetapkan sebanyak 7 orang informan dengan pertimbangan bahwa informan dianggap kompeten yang benar-benar mengetahui kondisi di lokasi penelitian.

Sumber data pada penelitian adalah data primer dan data sekunder. data primer adalah data yang langsung dapat diperoleh secara langsung dari responden melalui interview kepada 7 (tujuh) orang informan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain, baik yang sudah diolah maupun belum, yang menunjang penelitian (Nawawi, 2003:100). Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara kepada para informan (interview) dan pengambilan gambar kondisi di lapangan (dokumentasi).

Aktivitas dalam analisis data dilakukan melalui a). editing data yaitu Proses pengolahan data mentah yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data direduksi, dirangkum dan dipilih sesuai permasalahan

yang diteliti. b). Klasifikasi data adalah penggolongan data yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas dan kesimpulan yang tepat, c). Interpretasi data adalah data yang telah dimasukkan ke dalam tabel kemudian dicari makna atau artinya yang lebih luas dari data dan diolah dengan menghubungkan pada ilmu pengetahuan serta hasil penemuan yang ada, d). Menyimpulkan Data adalah data yang telah diinterpretasi kemudian disimpulkan dengan melihat hasil perhitungan dan hasil penemuan data yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi dalam pelayanan publik di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Kelima indikator ini akan di perjelas dalam pembahasan ini dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja fungsi dan peran pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Sigi.

### 1) Produktivitas

Produktivitas, merupakan efisiensi dan efektifitas pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam memberikan kualitas pelayanan kinerja terhadap anggota DPRD Kabupaten Sigi yang terkabung dalam alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas serta fungsinya di DPRD itu sendiri. Maka dari itu untuk mengetahui tentunya peneliti melakukan wawancara ke beberapa informan terkait masalah produktivitas kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai pembantu DPRD. Seperti yang disampaikan oleh Eddy Asrianto selaku Sekretariat Dewan (sekwan) Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa:

*“Saya mengakui bahwa memang benar di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini belum dapat dikatakan pelayanan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Karena DPRD dan AKD ini belum dapat secara efektif dan efisien dalam menjakan tugas dan fungsinya yang merupakan representative wakil dari masyarakat yang tentunya akan selalu memperjuangkan aspirasi masyarakatitu sendiri dalam hal ini pemberian pelayanan yang baik tentunya”.* (wawancara 1 Desember 2014).

Produktivitas disekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Alat Kelengkapan Dewan ini masih sangat rendah. Karena DPRD dan AKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien terhadap publik. Hal ini senada yang disampaikan Paulina selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“Memang benar bahwa produktivitas pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Alat Kelengkapan Dewan ini masih sangat rendah. Hal ini terlihat pada kinerja DPRD dan AKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini yang belum efektif dan efisien, sehingga segala bentuk pelayanan dan pengurusan keuangan menagalami berbagai macam masalah didalamnya”.* (wawancara 1 Desember 2014).

Sedangkan menurut Rangan selaku ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“Saya mengakui kinerja DPRD dan AKD Kabupaten Sigi ini belum berjalan dengan baik dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Hal ini disebabkan karena produktivitas di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ini belum berjalan efektif dan efisien dalam*

menjalankan tugas serta fungsinya di Dewan. Sehingga kinerja ini menjadi kurang baik dalam pemberian pelayanan kepadamasyarakat". (wawancara, 1 Desember 2014).

Pemerintah daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebaiknya melakukan perbaikan terhadap produktivitas kinerja DPRD dan AKD sehingga kinerja di Sekretariat Dewan (sekwan) ini bisaberjalan dengan baik. Sebab produktivitas ini adalah salah satu yang dapat membuat kinerja di sekretariat DPRD ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan di DPRD Kabupaten Sigi.

Sementara Abd. Rahman selaku ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*"tidak efektif dan efisiennya kinerja di Sekretariat Dewan ini disebabkan karena produktivitas yang masih sangat lemah. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja DPRD dan AKD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengalami berbagai macam masalah didalamnya seperti tidak efektif dan efisiennya pelayanan dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Sigi.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Karena produktivitas ini merupakan efisiensi dan efektifitas kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan. Produktivitas ini pula merupakan suatu hal yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam menjalankan tugas serta fungsinya di DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) itu sendiri. Maka dari itu rodutifitas ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja DPRD dan AKD di Sekretariat Dewan (sekwan) Kabupaten Sigi. Sementara menurut Tony W. Ponulele selaku Kabag Umum mengatakan bahwa:

*"Efisiensi dan efektifitas kinerja DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan Kabupaten Sigi masih sangat rendah, seperti pengelolaan keuangan dan administrasi sekretariat yang*

*terkesan sering mengalami hambatan dan permasalahan didalamnya, Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD dan AKD tidak berjalan dengan baik.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Hal ini berbeda dengan pendapat Frans Mua selaku Kabag perundang-undangan DPRD Kabupaten Sigi yang mengatakan bahwa:

*"memang sangat penting yang namanya keefektifitasan dan efisiensi sebuah kinerja dalam organisasi sebab efektifitas dan efisiensi ini adalah indikator keberhasilan DPRD dan AKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi seperti pembuatan peraturan peraturan daerah yang tentunya diharapkan mempunyai produktivitas yang baik, agar supaya ini akan berdampak positif terhadap masyarakat".* (wawancara, 8 Desember 2014)

Sementara Riswan selaku kepala Sub. Bagian perlengkapan rumah tangga mengatakan bahwa:

*"Memang benar bahwa didalam sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam hal ini DPRD dan AKD dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum berjalan dengan baik masih sering terjadi permasalahan seperti perlengkapan di DPRD serta pelayanan terhadap publik yang belum efektif. Sehingga kinerja DPRD ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mengalami banyak masalah didalamnya".* (wawancara, 8 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas mengakui bahwa produktivitas disekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini masih sangat lemah. Masih banyak program serta pelayanan yang tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari DPRD dan AKD di Kabupaten Sigi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini DPRD sangat diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD agar supaya pelayanan ini dapat berjalan dengan baik terhadap masyarakat Kabupaten Sigi. Karena

produktivitas ini adalah salah satu indikator untuk mencapai kinerja yang lebih baik serta menilai keberhasilan kinerja DPRD Kabupaten Sigi.

## 2) Kualitas Layanan

Kualitas pelayanan cenderung menjadi sangat penting dalam menjalankan organisasi pelayanan publik, banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai kinerja pegawai yang muncul karena ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan Publik. Berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan ini akan berpengaruh pada kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Dengan demikian keputusan masyarakat terkait masalah kualitas pelayanan dapat dijadikan indikator kerja organisasi. Kualitas pelayanan yang baik dimiliki oleh pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini dapat dijadikan salah satu indikator dalam mengukur kinerja pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Untuk mengetahui seperti apa kualitas pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka peneliti tentunya mewawancarai beberapa informan terkait masalah kualitas pelayanan DPRD Kabupaten Sigi. Seperti yang disampaikan Eddy Asrianto selaku Sekertariat DPRD (sekwan) Kabupaten Sigi mengatakan bahwa: *“saya mengakui kualitas pelayanan pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini belum mencapai kualitas pelayanan yang baik hal ini dapat terlihat pada pendidikan yang dimiliki serta pengalaman kerja pegawai Sekretariat DPRD yang masih sangat rendah. Sehingga hal inilah yang membuat kinerja pegawai Sekretariat DPRD ini tidak berjalan dengan baik karena faktor kualitas pelayanannya yang masih sangat terhitung rendah atau belum mencapai dari standar sesungguhnya”*. (wawancara 1 Desember 2014)

Pimpinan dalam hal ini sekwan untuk lebih tegas dalam memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna mencapai kinerja organisasi pemerintahan

yang baik dengan didukung oleh kualitas pelayanan yang baik pula. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (sekwan) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ini akan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Sigi yang melakukan urusan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Hal ini senada juga disampaikan oleh Paulina selaku wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“memang benar bahwa salah satu faktor kualitas pelayanan yang membuat kinerja di Sekretariat DPRD ini kurang baik sebab dari sekian banyak pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi ini hanya belasan orang yang mempunyai pendidikan S1 sementara lainnya pendidikan SMA dan sederajatnya. Sementara Kualitas pelayanan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi sangat diharapkan dapat memberikan kinerja yang positif. Sehingga untuk mencapai kualitas kinerja pelayanan yang baik ini sangat sulit didapatkan karena tidak didukung kualitas pelayanan yang baik dimiliki pegawai itu sendiri.* (wawancara 1 Desember 2014).

Hasil wawancara kedua diatas menggambarkan bahwa memang benar yang menjadi masalah kinerja pegawai ini kurang baik diakibatkan oleh kualitas layanan yang dimiliki pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi. Seperti pengalaman yang dimiliki serta status pendidikan yang juga masih relative rendah. Akibatnya kinerja sekretariat DPRD dan AKD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu untuk mengatasi semua ini tentunya pimpinan dalam hal ini Sekretariat Dewan diharapkan lebih tegas dan memperbaiki cara merekrut pegawai serta penempatan pegawai harus pada keahlian yang dimiliki setiap pegawai sehingga proses kerja organisasi pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Rangan selaku ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“yang membuat kinerja DPRD dan AKD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ini sehingga kuran baik ini disebabkan oleh faktor kualitas pelayan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi yang masih sangat rendah. Karena kualitas pegawai dalam hal inipendidikan serta pengalaman kerja masih relative rendah sehingga tidak herang kemudian ketika kualitas kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi ini menggarakan kenerja yang masih kategori kuarang baik”*. (wawancara 1 Desember 2014).

Kualitas pelayanan berupa sumberdaya manusia yang dimiliki setiap individu sangat dibutuhkan dalam sebuah instansi baik instasi suasta maupun di instansi pemerintahan seperti di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Sebab sumberdaya manusia yang baik ini akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kenerja pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini pula akan menjadi baik.

Sebagaimana yang disampaikan informan Abd. Rahman selaku ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“Mengakui bahwa memang benar di Kantor DPRD Kabupaten Sigi jika kita ingin mengukur pada faktor kualitas pelayanannya ini sangat rendah bagaimana tidak jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan sarjana ini hanya sekitar belasan orang saja sementara yang lainnya ini semua berpendidikan sederajat SMA. Jadi jangan heran ketika kinerja DPRD dan AKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinyakurang baik ini karena status pendidikan yang masih sangat rendah”*. (wawancara, 5 Desember 2014).

Sementara menurut Tony W. Ponulele selaku Kabag Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatakan bahwa:

*“bagaimana mungkin kualitas pelayanan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini tidak rendah. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya sumberdaya manusia yang dimiliki pegawai di DPRD. Sehingga untuk menjalankan tugas serta fungsi pegawai sebagai pebantu proses kerja DPRD maupun alat kelengkapan Dewan ini menjadi lambat dan tidak professional dan terpercaya dalam melaksanakan tugas serta fungsinya dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan pelayan publik”*. (wawancara, 5 Desember 2014)

Sejalan dengan pendapat Frans Mua selaku Kabag perundang-undangan DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya mengakui kualitas pelayanan pegawai di Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kabupaten Sigi masih sangat rendah sehingga tidak herang kemudian ketika kinerja DPRD dan alat kelengkapan dewan ini pun seringkali mengalamimasalalah dalam proses menjalankan tugas serta fungsinya.karena kualitas pelayanan yang dimiliki relative sangat minim seperti pendidikan yang dimiliki. Jadi wajar saja ketika kinerja ini tidak berjalan dengen maksimal”*. (wawancara, 8 Desember 2014).

Kualitas pelayanan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebab kualitas pelayanan ini adalah salah satu tolak ukur baik tidaknya kinerja Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam menjalankan tugas serta fungsinya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Oleh Karena itu, kualitas pelayanan ini sangat penting untuk ditingkatkan guna memperbaiki kinerja pegawai sekretariat dewan dan alat kelengkapan dewan untuk berjalannya kinerja dengan baik sesuai dengan harapan dan prinsip administrasinya.

Sementara Riswan selaku kepala Sub. Bagian perlengkapan rumah tangga mengatakan bahwa:

*“memang benar bahwa yang menjadi masalah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi adalah kualitas serta pengalaman kerja pegawai sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan yang masih sangat rendah. Jadi wajar saja ketika dalam sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering kali terjadi hambatan didalamnya seperti keterlambatan bekerja dan kualitas pelayanannya yang tidak terjamin.oleh karena itu, sangat diharapkan dilakukan perbaikan kualitas pelayanan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi guna untuk meningkatkan kinerja yang baik dalam pelayanan publik”.*(wawancara, 8 Desember).

Berdasarkan hasil wawancara menyimpulkan bahwa kualitas kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi masih sangat rendah sehingga membuat kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi serta Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak berjalan secara maksimal akibat faktor kualitas pelayanan yang relatif rendah. Dan hal inilah yang membuat pelayanan terhadap publik menjadi buruk dan tidak terjamin kualitas pelayanannya.

### 3). Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi untuk mengenali apa yang menjadi keinginan publik, dan kemampuan untuk menyusun agenda prioritas pelayanan dalam mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sigi. Secara singkat responsivitas mempunyai arti kejelasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi publik renponsivitas

yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan publik. Untuk mengetahui sejauh mana responsivitas pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi maupu alat kelengkapan DPRD dalam hal ini menjalankan tugas dan fungsi kedewanan. Maka peneliti harus mewawancarai beberapa informan yang dianggap faham dan mengerti dengan tugas kedewana.

Eddy Asrianto selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya menganggap pegawai di kantor DPRD Kabupatn Sigi telah mempunyai kemampuan mengenali apa yang sudah menjadi keinginan masyarakat dan program-prongam yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan. Dengan kemampuan inilah yang dapat mempercepat proses kinerja DPRD dan alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas dan fingsinya sebagai pelayanan terhadap publik”.* (wawancara, 1 Deember 2014).

Hal ini senada yang disampaikan wakil ketua DPRD Kabupaten Sigi dalam hal ini Paulina mengatakan bahwa:

*“memang benar bahwa pegawai disekretariat DPRD Kabupaten Sigi mau pun alat kelengkapan dewan (AKD) sudah memiliki kemampuandalam memberikan responsivitas kepada publik dalam hal mengenali keinginan publik serta program yang layak untuk dijadikan sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Sehingga dengan kemampuan responsivitas inilah yang membuat kinerja DPRD dan alat kelengkapan dewan akan berjalan dengan lancar’.*(wawancara 1 Desember 2014).

Hasil wawancara kedua informan diatas telah memberi gambaran bahwa memang benar di Kantor DPRD Kabupaten Sigi. Pegawai DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah mempunyai kemampuan responsivitas publik yang sudah cukup baik sehingga untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai sekretariat DPRD dan alat

kelengkapan dewan ini akan menjadi baik dan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing walaupun diakui masih terdapat hambatan didalamnya. Responsivitas yang baik ini akan memudahkan pegawai dalam penyusunan administrasi kedewanan berupa keuangan dan administrasi lainnya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.

Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi yaitu A. Rangan mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah kalau berbicara masalah responsivitas di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sudah baik menurutnya. Pegawai Sekretariat DPRD dan alat kelengkapan dewan sudah mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang menjadi harapan dan keinginan dari publik sehingga segala kelengkapan administrasi dan program prioritas telah disiapkan semua sehingga responsivitas kerja DPRD dan alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas serta fungsinya berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip administrasi”.* (wawancara, 1 Desember 2014).

Responsivitas yang baik ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas serta fungsi Sekretariat Dewan dan alat kelengkapan dewan dalam melaksanakan pelayanan publik. Sehingga kinerja dalam berbagai bidang sangat diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan DPRD Kabupaten Sigi. Sementara Tonny W. Ponulele selaku Kabag. Umum DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya mengakui pegawai dikantor DPRD Kabupaten Sigi sudah cukup mempunyai kemampuan mengenali apa yang menjadi keinginan masyarakat. sehingga dalam melaksanakan tugas serta fungsi dari pada pegawai Kesekretariatan DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berupa administrasi serta keuangan di DPRD ini tidak lagi merasa kesulitan. Sebab apa yang*

*ingin dikerjakan itu sudah diketahui”.* (wawancara, 5 Desember 2014).

Frans Mua selaku Kabag. Perundang-Undangan mengatakan bahwa:

*“Kemampuan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengenali keinginan publik serta mengetahui program yang harus dijadikan sebagai program prioritas dalam sebuah program. Dan hal inilah yang membuat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi mudah dalam pelaksanaannya. Karena semua program sudah diketahui dan ini akan memudahkan pegawai menyusun program yang akan didahulukan”.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Responsivitas ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja di sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Namun Responsivitas ini sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat pada kemampuan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam merespon cepat apa yang menjadi keinginan publik. Sehingga segala program akan dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas dan tidak prioritas untuk dilaksanakan pada program kedepannya di DPRD Kabupaten Sigi. Sementara Riswan selaku kepala Sub. Bagian perlengkapan rumah tangga mengatakan bahwa:

*“saya mengakui responsivitas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini sudah berjalan dengan baik. Kemampuan pegawai Sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam mengenali apa yang menjadi kebutuhan prioritas publik mendapatkan respon yang cepat hal inilah yang membuat proses kinerja DPRD dan alat kelengkapan dewan dalam menjalankan tugas serta fungsinya berjalan dengan baik”.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat di rumuskan bahwa responsivitas ini adalah faktor yang sangat penting dalam

sebuah organisasi seperti di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi demi mendorong kinerja DPRD Kabupaten Sigi yang lebih baik lagi. Sebab responsivitas yang baik ini akan dapat meningkatkan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini akan menjadi baik pula dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya. Sehingga peran dari pimpinan yaitu Sekretariat Dewan (sekwan) dan Ketua DPRD sangat diharapkan demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai sekretariat DPRD dan AKD Kabupaten Sigi.

#### 4). **Responsibilitas**

Responsibilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting. Sebab responsibilitas ini menyangkut masalah prinsip-prinsip organisasi administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan yang telah diambil oleh organisasi pemerintahan. Sehingga faktor responsibilitas ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menilai kinerja pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi. Untuk mengetahui seperti apa faktor responsibilitas ini mempengaruhi kinerja pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut Eddy Asrianto selaku Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya mengakui pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sudah cukup baik karena sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan dalam pelaksanaan program sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Sigi. Kesesuaian pelaksanaan program dengan prinsip administrasi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini menggambarkan bahwa responsibilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan baik”.* (wawancara, 1 Desember 2014).

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik yang sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan atau dikenal dengan responsibilitas yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan. Sebab responsibilitas ini merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana kinerja sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Responsibilitas yang baik tentunya ini akan membuat kinerja akan baik pula tentunya begitupun sebaliknya. Paulina selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi juga mengatakan hal yang senada, mengatakan bahwa:

*“memang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari sekretariat DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Responsibilitas kinerja DPRD dan AKD yang sudah baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah berdasarkan pada prinsip yang ada”.* (wawancara, 1 Desember 2014).

Hasil wawancara dari kedua informan diatas telah menunjukkan bahwa responsibilitas pelaksanaan tugas serta fungsi dari alat kelengkapan dewan telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Faktor responsibilitas yang baik ini merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Alat Kelengkapan Daerah di Kabupaten Sigi tentunya akan baik sementara responsibilitas yang buruk ini akan mempengaruhi kinerja DPRD dan AKD akan buruk pula. Sementara menurut A. Rangan selaku Ketua komisi I DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“Responsibilitas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan. Yang dimana*

*DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sudah berjalan pada prinsip administrasi. Sehingga proses kinerja DPRD ini menjadi baik dalam pelaksanaan pelayanan terhadap publik di kantor DPRD Kabupaten Sigi”.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Responsibilitas dalam sebuah organisasi maupun instansi pemerintahan sangat diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan AKD. Sebab responsibilitas ini adalah salah satu indikator dalam mengukur sejauh mana kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi dalam melayani publik yang membutuhkan. Abd. Rahman selaku ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan AKD sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip administrasi pemerintahan sehingga dengan kesesuaian pada prinsip administrasi ini membuat kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi menjadi baik. karena responsibilitas yang dilaksanakan ini sudah berdasarkan pada prinsip administrasi. Maka kinerja yang diperoleh dalam pelayanan menjadi baik pula”.* (wawancara, 8 Desember 2014).

Hal ini sejalan dengan pendapat Tonny W. Ponulele selaku Kabag. Umum DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya mengakui pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik. Yang mana pegawai sekretariat DPRD ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi pemerintahan. Sehingga dalam proses pemberian pelayanan terhadap masyarakat teratur pada pelaksanaan aministrasinya yang berakibat kinerja DPRD dan AKD berjalan dengan baik sesuai dengan aturan administrasi.”* (wawancara, 8 Desember 2014).

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut telah memberi gambaran bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan AKD sudah berjalan dengan baik berdasarkan pada faktor responsibilitas administrasi yang baik dan terpercaya. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan terhadap publik ini terjamin pelayanannya karena sudah berdasarkan pada prinsip administrasi yang benar dan terpercaya. Maka dari itu responsibilitas ini menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi pemerintahan demi terciptanya kinerja sekretariat DPRD dan AKD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan menurut Frans Mua selaku Kabag. Perundang-Undangan mengatakan bahwa:

*“memang benar bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari pegawai sekretariat DPRD dan AKD Kabupaten Sigi ini sudah berjalan dengan baik berdasarkan pada prinsip administrasi pemerintahan. Sehingga pelayanan terhadap publik ini berjalan dengan baik. Sebab pelaksanaan reponsibilitas kinerja ini sudah berdasarkan pada prinsip administrasi yang benar.”* (wawancara, 8 Desember 2014).

Hal ini sejalan dengan pendapat Riswan selaku kepala Sub. Bagian perlengkapan rumah tangga mengatakan hal yang senada bahwa:

*“memang benar bahwa kinerja yang baik ini bergantung pada pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan AKD dalam pelayannya terhadap publik. dan alhamdulillah menurutnya untuk sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini sudah berjalan berdasarkan pada prinsip administrasi pemerintahan yang benar. Sehingga kinerja di sekretariat DPRD pun menjadi baik dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.”* (wawancara, 8 Desember 2014).

Berdasarkan dari hasil wawancara kedua informan diatas telah membenarkan bahwa pelaksanaan kinerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi sudah berjalan dengan baik. Yang di

mana DPRD dan AKD dalam melaksanakan tugas serta fungsinya sudah berdasarkan pada administrasi yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu tanggung jawab ini penting untuk tetap di jaga dan ditingkatkan demi terciptanya kinerja disekretariat DPRD dan AKD ini menjadi baik dalam pemberian pelayanan kepada publik. Tanggung jawab yang baik dalam sebuah instansi ini adalah salah satu indikator dalam penilaian kinerja DPRD Kabupaten Sigi.

### 5). Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti berapa besar kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Akuntabilitas ini pula merupakan suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang ada dipublik atau yang dimiliki beberapa stakeholder. Oleh karena itu, faktor akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting dimiliki setiap organisasi pemerintahan maupun instansi lainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui seperti apa akuntabilitas yang dimiliki pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Sigi peneliti mewawancarai beberapa informan sebagai berikut Eddy Asrianto selaku Sekretaris Dewan (sekwan) Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“memang saya mengakui bahwa masih terdapat pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi yang tidak patuh terhadap aturan yang sudah ada. Padahal salah satu yang menjadi ukuran untuk menilai kinerja pegawai dapat dilihat pada kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi masih terdapat pegawai melanggar aturan. Sehingga untuk mencapai sebuah kinerja pegawai yang baik ini sangat sulit tanpa dorongan akuntabilitas pimpinan yang baik dalam hal ini Sekretariat Dewan*

*Kabupaten Sigi”.* (wawancara, 1 Desember 2014)

Hasil wawancara diatas senada dengan yang disampaikan Paulina selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya pun mengakui bahwa memang benar masih terdapat pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi yang tidak patuh terhadap peraturan di DPRD, sehingga tidak heran kemudian ketika untuk mencapai suatu kinerja yang baik ini sangat sulit didapatkan tanpa akuntabilitas kerja pegawai yang kurang baik. oleh karena itu akuntabilitas ini menjadi hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam memperbaiki kualitas kerja pegawai di kantor DPRD Kabupaten Sigi”.* (wawancara. 1 Desember 2014)

Hasil wawancara tersebut telah menggambarkan bahwa memang benar akuntabilitas dalam hal ini kepatuhan pegawai terhadap pimpinannya ini tidak dapat dijadikan contoh. Sebab akuntabilitas ini merupakan indikator dalam mengukur tingkat kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi yang baik terhadap masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas ini penting kiranya untuk di evaluasi guna mencapai kinerja yang lebih baik tentunya. Sehingga kinerja pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini akan lebih baik dari sebelumnya.

Sementara menurut A. Rangan selaku Ketua komisi I DPRD Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*“saya menganggap bahwa akuntabilitas pimpinan dalam memimpin pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi ini masih sangat rendah. Hal ini terlihat masih terdapatnya pegawai yang tidak patuh terhadap atasan hal ini disebabkan karena ketegasan dari pimpinan yang tidak terlihat sehingga terdapat beberapa pegawai ini yang terkadang melanggar aturan yang sudah ada dan juga hal ini juga ada hubungannya*

*dengan tanggungjawab pimpinan terhadap bahannya yang tidak menggambarkan sebagai mana fungsi dan peran dari seorang pemimpin sebuah organisasi pemerintahan itu sendiri*". (wawancara, 1 Desember 2014).

Menurut pendapat A. Rangan bahwa sebuah organisasi pemerintahan akuntabilitas sangat dibutuhkan, sebab akuntabilitas ini menyangkut masalah tanggungjawab setiap organisasi baik pimpinan maupun bawahan. Sehingga untuk mengukur sejauh mana kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dapat dilihat dari faktor akuntabilitas yang dimiliki pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan itu sendiri.

Senada dengan jawabana dari Abd. Rahman selaku ketua komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi mengatakan bahwa:

*"saya melihat didalam sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, masih banyak pegawai yang tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang sudah menjadi tanggungjawabnya hal ini menurut dia percaya bahwa ini ada hubungannya dengan pimpinan dalam hal ini Sekretariat Dewan (sekwan) yang tidak punya tanggung jawab terhadap bawahannya. Padahal akuntabilitas ini sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi pemerintahan guna untuk melancarkan proses kerja pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi"*. (wawancara, 5 Desember 2014).

Sedangkan menurut Frans Mua selaku Kabag. Perundang-Undangan mengatakan bahwa:

*"memang benar bahwa di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Masih terlihat beberapa pegawai yang tidak patuh dan taat terhadap peraturan seperti jam masuk dan tidak sopan dalam memberi pelayanan kepada publik. Padahal telah diketahui bersama bahwa kepatuhan jam masuk kantor dan disiplin sikap adalah indikator baik dan tidaknya kinerja Sekretariat DPRD dan AKD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam*

*memberikan pelayanan terhadap publik"*. (wawancara, 8 Desember 2014).

Akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting guna untuk memperbaiki hasil kinerja DPRD dan AKD dalam pelaksanaan tugas serta fungsinya dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Maka akuntabilitas berupa tanggung jawab merupakan salah satu penentu berhasil tidaknya kinerja yang diharapkan. Sehingga setiap pegawai dan sekretariat DPRD wajib untuk memiliki akuntabilitas yang baik demi mendorong kinerja DPRD Kabupaten Sigi lebih maju dan dapat dijadikan sebagai DPRD percontohan kepada DPRD lainnya dalam hal ini indikator akuntabilitasnya dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Sementara Riswan selaku kepala Sub. Bagian perlengkapan rumah tangga mengataan bahwa:

*"di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi ini masih terdapat beberapa pegawai yang tidak patuh terhadap pimpinan, ketidak patuhan ini dapat terlihat pada kebiasaan pegawai yang sering lambat masuk kantor dan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya yang telah diberikan. Padahal menurutnya seorang pegawai itu yang digaji oleh Negara sebaiknya mempunyai sikap dan baik dan mempunyai kedisiplin serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat"*. (wawancara, 8 Desember 2014).

Hasil wawancara diatas telah menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan kinerja di sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam hal ini DPRD dan AKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum dapat dikatakan baik. Sebab masih terdapat beberapa pegawai disekretariat DPRD yang tidak patuh terhadap peraturan yang ada di DPRD misalnya yang sering dilagga pegawai yaitu jam masuk kantor dan kedisiplinan berpakaian yang masih sangat terlihat jelas dengan mata kepala oleh berapa masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Agus Dwiyanto, 2008: 50) yang menyatakan bahwa Perbaikan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan public menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat memengaruhi kinerja pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan daya saing suatu Negara dapat menghadapi era global sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi banyak kalangan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang didapatkan lapangan, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu dari ke lima indikator dalam mengukur kinerja pegawai tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam pelayanan publik ini digunakan oleh Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, responsivitas, responsibilita, dan Akuntabilitas. Dari kelima indikator kinerja tersebut indikator ketiga indikator yaitu produktivitas, kualitas pelayanan dan akuntabilitas ini belum berjalan baik atau masih buruk.

Sementara faktor responsivitas dan responsibilitas ini sedikit sudah berjalan dengan baik sebab faktor responsivitas ini memberi gambaran kemampuan mengenali keinginan publik serta penyusunan program yang prioritas yang akan dikerjakan. sedangkan responsibilitas ini pula juga sudah baik karena program sudah berjalan berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang ada serta pada prinsip-prinsip yang sesungguhnya. Sehingga kinerja DPRD serta alat kelengkapan dewan ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisiensi dalam meningkatkan pelayanan publik.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka yang menjadi saran kami dalam menutup penyusunan tesis ini sebai pesan akhir dari tulisan kami sebagai berikut:

1. Sebaiknya pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi untuk lebih tegas serta bertanggungjawab atas apa sudah yang menjadi tugas serta fungsinya sebagai pimpinan.
2. DPRD Dan Alat Kelegkapan Dewan (AKD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk harus diperbaiki dari segi produktivitas, akauntabilitas dan kualitas pelayanannya terhadap publik.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi diharapkan dapat menciptakan kinerja yang lebih baik yang bedasarkan pada prinsip administrasi yang lebih baik.
4. Untuk efektif serta efisiensinya sebuah kinerja Sekretariat DPRD dan AKD aka yang arus ditingkatkan adalaah akuntabilitas pimpinan dan kualitas pelayanannya.
5. Semakin rapuhnya kepercayaan pada publik terhadap kinerja DPRD di era reformasi ini, maka revitalisasi moral harus di mulai dari sisi individual sekretariat Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah Kabupaten Sigi itu sendiri. Sehingga akan dapat menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan Syukur penulis sinantiasa panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penyusun tesis ini dapat diselesaikan. Penyelesaian tesis ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, utamanya kepada ketua Tim Pembimbing Dr. Dirdjan N. Jahya, M.Si dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Muzakir Tawil, M.Si. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terutama bagi diri penulis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad S Ruky. 2003. *SDM Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Dwiyanto Agus, 2008. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexi J., 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Nawawi H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.